

## **Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMK Negeri 3 Sampit**

**Febri Sugiyanto**

Prodi MPI, Pascasarjana UIN Palangka Raya

\*Email Korespondensi: [febri\\_sugiyanto.pasca2410130402@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:febri_sugiyanto.pasca2410130402@iain-palangkaraya.ac.id)

Diterima: 15-06-2025 | Disetujui: 16-06-2025 | Diterbitkan: 19-06-2025

### **ABSTRACT**

*The purpose of this article is to determine the implementation of quality assurance at SMK Negeri 3 Sampit. The type of approach used is a qualitative approach with a qualitative descriptive method. The results of the study show that quality assurance at SMKN 3 Sampit begins with the School Self-Evaluation (EDS) to obtain a mapping of quality achievements from each aspect of the National Education Standards (SNP). Quality achievements that are considered lacking are then improved through continuous quality fulfillment. Efforts to fulfill quality are planned by the School Education Quality Assurance Team (TPMPS) which are outlined in the form of a quality fulfillment planning document. It describes activities, objectives, implementation strategies, success indicators, and details of the costs required. Furthermore, the quality fulfillment plan is realized in every aspect of learning by involving educational components comprehensively. The implementation of quality fulfillment is monitored by TPMPS on an ongoing basis. All implementations are then evaluated to see the effectiveness of implementation with the quality fulfillment plan towards achieving the National Education Standards. The results will be analyzed to determine new, more effective quality standards. The entire series is documented in the form of an SPMI report card.*

*Keywords: Concept Of School Education Quality Assurance.*

### **ABSTRAK**

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penjaminan mutu di SMK Negeri 3 Sampit. Jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penjaminan mutu di SMKN 3 Sampit yang diawali dari Evaluasi Diri Sekolah (EDS) untuk memperoleh pemetaan capaian mutu dari setiap aspek Standard Nasional Pendidikan (SNP). Capaian mutu yang dirasa kurang selanjutnya diperbaiki melalui pemenuhan mutu secara berkelanjutan. Upaya pemenuhan mutu direncanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan pemenuhan mutu. Di dalamnya diuraikan kegiatan, tujuan, strategi pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta rincian biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya rencana pemenuhan mutu direalisasikan kepada setiap aspek pembelajaran dengan melibatkan komponen pendidikan secara komprehensif. Pelaksanaan pemenuhan mutu dimonitoring oleh TPMPS secara berkelanjutan. Seluruh pelaksanaannya kemudian dievaluasi untuk melihat efektifitas pelaksanaan dengan rencana pemenuhan mutu terhadap pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Hasilnya akan dianalisis untuk penetapan standar standar mutu baru yang lebih efektif. Seluruh rangkaian tersebut didokumentasikan dalam bentuk rapor SPMI.

Kata Kunci : Konsep Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah.



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Febri Sugiyanto. (2025). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMK Negeri 3 Sampit. Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia, 1(1), 110-118. <https://doi.org/10.63822/78grtz09>



## PENDAHULUAN

Pendidikan sampai saat ini masih menempati posisi pertama sebagai aspek yang dipandang paling berpengaruh dalam menentukan maju atau mundurnya suatu negara. Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang bermutu tinggi pun semakin tinggi.. Hal ini ditandai dengan rendahnya daya saing dalam dunia kerja di luar negeri. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, merupakan bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Misi utamanya adalah untuk menyiapkan lulusan dari tingkat pendidikan menengah yang siap masuk dunia kerja.

SMK diyakini mampu menghasilkan lulusan dengan kreatifitas dan produktivitas yang tinggi, sehingga mampu menaikkan taraf perekonomian masyarakat (Putri, 2020). Hal ini karena pendidikan kejuruan bertujuan untuk menghasilkan manusia kerja, dalam artian manusia mandiri berdikari, tidak menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Mengacu pada tujuannya, pembelajaran di SMK berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa untuk dapat menguasai dan melaksanakan pekerjaan tertentu. Kegiatan pembelajaran di SMK didominasi oleh kegiatan praktik yaitu sebanyak 70%, dan sisanya adalah teori di dalam kelas. Hal ini sesuai dengan tujuannya untuk memberikan bekal keterampilan siswa dalam memasuki dunia kerja. Meskipun sebagian besar lulusannya dapat menembus berbagai industri, namun fakta jumlah pengangguran lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan lainnya tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal tersebut merupakan salah satu indikator ketidakmampuan SMK untuk menjamin mutu pendidikannya sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu meliputi penilaian hasil belajar, penyusunan perencanaan peningkatan mutu pendidikan, implementasi peningkatan mutu pendidikan, serta evaluasi proses pembelajaran (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016). Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas lulusan yang pada akhirnya berdampak pada jumlah pengangguran yang lebih tinggi dibanding lulusan SMA. Hal senada juga disampaikan oleh Sutikno (2022) bahwa permasalahan yang dominan terjadi di SMK saat ini adalah belum mampunya sekolah dalam mengelola dan melaksanakan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri serta tuntutan masyarakat.

Mengacu pada kompleksitas permasalahan tersebut, maka para pelaksana pendidikan kejuruan hendaknya selalu melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan beserta seluruh aspek di dalamnya secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Mutu pendidikan tidak semata-mata ditentukan dan dinilai oleh pemimpin pendidikan, melainkan oleh *stakeholder* dan khalayak umum. Mutu dalam konteks pendidikan menurut Pendidikan Menengah Umum (1999) mengacu pada *input* (siswa, guru, kepala sekolah, staf tata usaha, sarana prasarana, serta kurikulum), *process* (layanan pembelajaran, layanan konseling, kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, serta hubungan sekolah dengan masyarakat), serta *output* (prestasi sekolah dan siswa yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen sekolah)

Sementara itu, menurut Leba dan Padmomartono (2014) mutu bidang pendidikan dapat dinilai melalui lima aspek, yakni *output*, pelayanan, sumber daya manusia (tenaga pendidik dan kependidikan), aspek proses, dan aspek lingkungan. Secara tidak langsung, mutu dalam pendidikan



dapat diketahui melalui tiga pertanyaan, yaitu: bagaimana sumber daya di dalamnya, bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan, serta bagaimana lulusan yang dihasilkan. Sekolah dikatakan bermutu apabila dapat memenuhi bahkan melampaui keinginan dan harapan *stakeholders* serta menetapkan spesifikasi atau perincian yang tinggi (Sallis, 2010). Sekolah bermutu memiliki pola kerja yang terpadu, baik pada tataran kebijakan sistem nasional, institusi, manajerial, maupun tataran teknis, sehingga terdapat sinkronisasi dan sinergi antar setiap tataran (Rahmah, 2018). Oleh karenanya, sekolah dikatakan bermutu apabila dalam praktiknya mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai.

Penjaminan mutu merupakan keseluruhan proses dalam penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelola yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, untuk dapat mencapai visi dan misi sebagai bentuk tanggung jawab dan pemenuhan janji kepada *stakeholders* (Ridwan, 2015). Penjaminan mutu merupakan sesuatu yang mutlak dipenuhi sebagai bentuk konsekuensi atas tuntutan *stakeholder* terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang cakap dan terampil. Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan menjadi tanggungjawab para pemangku pendidikan bersama dengan pemerintah. Penjaminan mutu pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dimana secara eksplisit disebutkan satuan pendidikan baik jalur formal maupun nonformal wajib untuk melakukan penjaminan terhadap mutu pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Lebih lanjut disebutkan dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, disebutkan bahwa tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan kebijakan tersebut, kemudian dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang terdiri atas dua komponen, yaitu: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPME merupakan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemangku pendidikan, sedangkan SPMI merupakan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan (Wahyuni & Murtadlo, 2019). SPMI dilakukan secara mandiri oleh setiap sekolah dengan mengikuti siklus sebagaimana telah disebutkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan dijalankan oleh seluruh anggota sekolah. SPMI berperan sebagai sistem peringatan dini yang artinya dengan adanya SPMI yang diimplementasikan dengan cermat dan tepat dapat digunakan sebagai perbaikan dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga tidak semakin memburuk (Sarmono, Supriyanto, & Timan, 2020).

Implementasi SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan serta melibatkan dan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada untuk mencapai delapan standar nasional pendidikan. Implementasi SPMI terdiri dari lima langkah kegiatan, yaitu: 1.) Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan; 2.) Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS); 3.) Melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran; 4.)

*Monitoring* dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan 5.) Menetapkan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi (Kemendikbud, 2016). Implementasi SPMI yang baik menghasilkan beberapa dampak positif diantaranya adalah peningkatan prestasi peserta didik, peningkatan prestasi sekolah, serta utamanya ialah daya saing lulusan yang tinggi (Darmaji, Supriyanto, & Timan, 2019). Kebijakan sistem penjaminan mutu ini kemudian disusul dengan munculnya sekolah model dan sekolah imbas yang mulai diberlakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LMPM) pada tahun 2016. Sekolah model sendiri merupakan sekolah yang telah memenuhi mutu pendidikan berdasarkan pada delapan standar nasional pendidikan.

Sekolah model berkewajiban untuk mengimbaskan bagaimana praktik sistem penjaminan mutu pendidikan yang baik dan sesuai kepada lima sekolah disekitarnya. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan sekolah dalam menjamin, mempertahankan, dan meningkatkan mutu pendidikannya, sehingga tercipta budaya mutu di sekolah yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu lulusan dan mencapai tujuan nasional pendidikan (Sukaryanti & Supriyoko, 2020). SMK Negeri 3 Sampit sebagai salah satu SMK unggul dan efektif yang memiliki beberapa tujuan pendidikan, salah satunya ialah mewujudkan layanan pendidikan yang melampaui standar nasional pendidikan.

Penelitian terkait penjaminan mutu pendidikan pernah dilakukan oleh Fathoni (2008), dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan kualitas pendidikan melalui sistem penjaminan mutu. Tujuan penelitian Fathoni (2008) tersebut untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang pemahaman pengelola sekolah tentang sistem penjaminan mutu, mengungkapkan proses penetapan standar mutu yang meliputi standar mutu yang diterapkan di masing-masing sekolah, cara pengelola sekolah menetapkan standar mutu, dan faktor-faktor yang menjadi dasar penetapan standar mutu, serta memberikan gambaran strategi sekolah dalam mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Temuan penelitian tersebut berupa perspektif pengelola sekolah sebagai wujud dari kebaikan sesuatu yang tercermin dalam ketercapaian standar atau indikator mutu melalui proses yang baik, sehingga memenuhi harapan pelanggan dan memberikan nilai manfaat bagi pelanggannya, standar mutu minimal yang harus dimiliki lembaga pendidikan Islam, serta langkah-langkah pencapaian mutu pendidikan yang secara keseluruhan mencakup tiga tahap yaitu *planning*, *implementating*, dan *controlling*.

Berdasarkan latar belakang dan alur pikir sebagaimana yang telah dipaparkan, maka dalam artikel ini penulis menguraikan implementasi sistem penjaminan mutu disalah satu pendidikan menengah kejuruan di Kotawaringin Timur melalui judul Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Sampit.

## METODE

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengungkapkan fenomena melalui pengumpulan data pada kondisi objek yang alami dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang kehadirannya mutlak diperlukan. Data dalam penelitian ini adalah data terkait implementasi penjaminan mutu di SMK Negeri 3 Sampit. Sementara sumber datanya ialah wakil

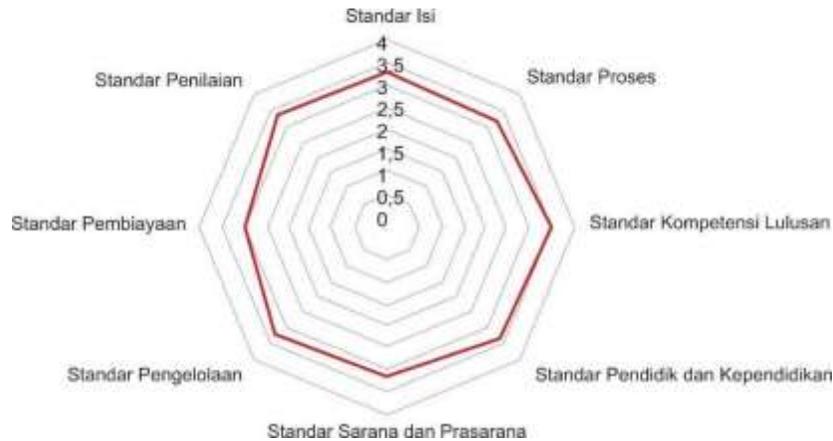


kepala sekolah bidang penjaminan mutu sekolah dan perwakilan anggota Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Data diperoleh menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahapan kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan sumber data temuan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan penguatan bukti dari berbagai sumber data untuk menghasilkan hasil yang akurat dan terpercaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

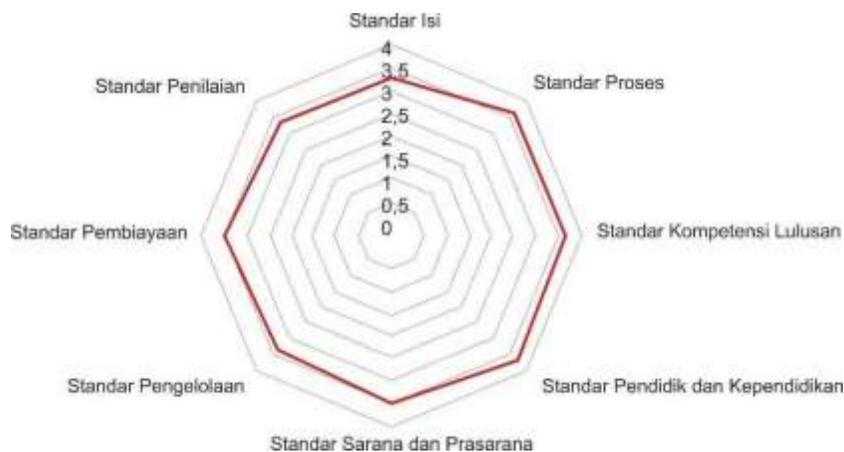
Hasil SMK Negeri 3 Sampit merupakan salah satu sekolah kejuruan favorit di Kabupaten Kotawaringin timur yang diminati banyak lulusan, terbukti dengan banyaknya pendaftar setiap tahunnya. Sekolah tersebut telah mengimplementasikan penjaminan mutu pendidikan sesuai delapan standar nasional pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMKN 3 Sampit bertujuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan, sehingga dapat melampaui harapan pengguna layanan pendidikan. Lulusannya memiliki keterampilan sesuai konsentrasi keahlian yang ditempuh untuk digunakan sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang diterima bekerja di berbagai bidang industri. Sementara sisanya mampu melanjutkan ke pendidikan tinggi negeri maupun swasta.

Berdasarkan hasil wawancara, prosedur pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di SMK Negeri 3 Sampit secara garis besar telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di tingkat SMK, walaupun ada perbedaan itu hanya sebagai kecil yang dikarenakan kondisi dan karakteristik sekolah atau daerah yang berbeda satu dengan yang lain. Implementasi sistem penjaminan mutu internal di SMK Negeri 3 Sampit dimulai dari pemetaan mutu yang dilaksanakan melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Melalui evaluasi diri sekolah inilah diperoleh sejumlah data dan informasi. Data dan informasi tersebut selanjutnya diolah melalui sistem informasi milik pemerintah sehingga mampu secara akurat menunjukkan nilai capaian mutu dari setiap aspek standar nasional pendidikan. Hasil pemetaan mutu kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui capaian mutu yang dirasa kurang sehingga dapat diperbaiki dengan beracuan pada prosedur sistem penjaminan mutu internal. Pemetaan mutu tahun ajaran 2023/2024 memperoleh nilai keseluruhan 3,3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Capaian Mutu SMK Negeri 3 Sampit Tahun Ajaran 2023/2024

Hasil pemetaan mutu ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, *monitoring* dan evaluasi, serta penetapan standar baru pemenuhan mutu berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi. Hasil evaluasi pemenuhan mutu tahun ajaran 2024/2025 mengalami peningkatan sebesar 0,2 menjadi 3,5. Hasil ini dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Capaian Mutu SMK Negeri 3 Sampit Tahun Pelajaran 2024/2025

### Pembahasan

Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMK Negeri 3 Sampit dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggungjawab serta guru, staf, dan perwakilan komite sekolah. Ditegaskan pula oleh narasumber, bahwa sebagai salah satu sekolah model, pihak SMK Negeri 3 Sampit mengupayakan penjaminan mutu semaksimal mungkin serta mengimbaskan pada sekolah-sekolah disekitarnya sesuai amanat pemerintah. Implementasi sistem penjaminan mutu internal dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh unsur

*Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMK Negeri 3 Sampit*

(Febri Sugiyanto.)

sekolah. Paradigma penjaminan mutu harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh komponen sekolah. Kepala sekolah, guru, dan karyawan harus menjadi tim kerja yang saling utuh, saling membantu, memberi dukungan, dorongan, dan melengkapi satu sama lain (Saifulloh, Muhibbin, & Hermanto, 2012).

Pemetaan mutu dilakukan pada setiap satuan standar nasional pendidikan termasuk komponen serta masing-masing indikator di dalamnya, dan didukung dengan bukti fisik. Contohnya Perangkat administrasi pembelajaran, Asesemen penilaian, instrumen supervisi, dan lain sebagainya. Lebih baik jika hasil pemetaan mutu yang diperoleh dari evaluasi diri sekolah disajikan secara singkat namun informatif (Kemendikbud RI, 2016). Selanjutnya dilakukan pengecekan kebenaran data, olah data, dan analisis data oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah untuk dapat menghasilkan data yang mutakhir dan akurat yang mampu mempresentasikan capaian mutu SMK Negeri 3 Sampit terhadap standar nasional pendidikan.. Berdasarkan hasil pemetaan mutu akan disusun skala prioritas kebutuhan yang kemudian menjadi dasar penyusunan rencana pemenuhan atau peningkatan mutu. Dalam menyusun rencana pemenuhan mutu Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah akan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain visi misi sekolah, kebijakan internal sekolah, serta kebijakan pusat dan daerah. Hal ini dimaksudkan agar rencana pemenuhan mutu dapat mencapai standar nasional pendidikan dengan tetap mengacu pada efektivitas tujuan sekolah. Rencana pemenuhan mutu yang telah disusun selanjutnya dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan mutu atau Rencana Kerja Sekolah (RKS) baik jangka menengah maupun jangka panjang. RKS disusun secara sistematis mencakup berbagai komponen, selanjutnya diuraikan secara spesifik yaitu terkait bentuk program pemenuhan mutu, tujuan, strategi pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta rincian biaya yang dibutuhkan.

Pelaksanaan pemenuhan mutu di SMK Negeri 3 Sampit, selalu dimonitor oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan mutu melalui evaluasi diri sekolah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pemenuhan mutu serta kesesuaiannya dengan rencana pemenuhan mutu, guna menjamin terjadinya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi ini, selanjutnya akan dilakukan penetapan standar mutu baru sebagai upaya pemenuhan mutu kedepannya. Standar mutu yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 3 Sampit.

## SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini, pengembangan kurikulum menganut empat prinsip, yaitu; prinsip signifikansi sosial, prinsip pertumbuhan, prinsip perbedaan individu, dan prinsip integrasi. Prinsip signifikansi sosial bermakna bahwa sekolah didirikan dan berdiri di tengah- tengah masyarakat. Oleh karena itu, proses kurikulum dan pembelajaran di sekolah harus mampu membantu masyarakat dalam mencapai tujuan sosialnya. Prinsip pertumbuhan adalah prinsip yang memperhatikan fase-fase perkembangan peserta didik yang selalu tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan peserta didik meniscayakan kurikulum dan pembelajaran di sekolah perlu beradaptasi dengan situasi, kondisi, dan tuntutan di tempat dan waktu peserta didik hidup.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Darmaji, D., Supriyanto, A., & Timan, A. (2019). Sistem Penjaminan Mutu Internalsekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*, 3(3), 130-136. doi: <http://dx.doi.org/10.17977/um025v3i32019p130>
- Fathoni, M. (2008). *Peningkatan kualitas pendidikan melalui sistem penjaminan mutu (Studi multi situs di SD Al Falah Tropodo 2 Sidoarjo, SDIT Bina Insani Kediri, dan SDIT Al Hikmah Blitar)* (Unpublished doctoral dissertation). Universitas Negeri Malang, Indonesia.
- Frangou, A. J. (1997). *Towards a case-based intelligent system for competitive advantage* (Unpublished doctoral dissertation). University of Portsmouth, United Kingdom.
- Gustini, N., & Mauliy, Y. (2019). Implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar. *Jurnal Isema: Islamic Education Management*, 4(2), 229-244. Retrieved from <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/isema/article/view/5695>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Petunjuk pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*.
- Leba, U. T. I., & Padmomartono, S. (2014). *Profesi kependidikan*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI).
- Putri, Z. D. (2020). Implementasi standar pengelolaan pendidikan SMK Negeri 1 Bengkalis. *Jurnal Pendidikan MINDA*, 1(2), 61-73. Retrieved from <http://www.ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/mindafkip/article/view/124/96>
- Sodiq, R., & Haryana, K. (2017). Evaluasi penjaminan mutu pendidikan Di SMK Negeri 1 Magelang. *E-Jurnal Pendidikan Teknik Otomotif-S1*, 18(2), 111-121. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/otomotif-s1/article/view/10131/9695>
- Sarmono, A., Supriyanto, A., & Timan, A. (2020). Penerapan manajemen mutu terpadu pada sistem penjaminan mutu pendidikan internal. *JAMP : Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(1), 38-51. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/article/view/7739/5230>
- Sukaryanti, B. (2020). Manajemen sekolah model sistem penjaminan mutu internal di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. *Media Manajemen Pendidikan*, 2(3), 362-371. doi: <https://doi.org/10.30738/mmp.v2i3.6739>
- Wahyuni, R. R. W., & Murtadlo, M. (2019). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Surabaya. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/29153/26696>
- Veithzal, R., & Murni, S. (2009). *Education management: Analisis teori dan praktik*. Raja Grafindo Persada.